



Judul : Akses media sosial anak, youtube dan roblox belum patuhi PP Tunas
Tanggal : Senin, 20 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Akses Media Sosial Anak YouTube Dan Roblox Belum Patuhi PP Tunas

KOMISI I DPR terus memantau pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP Tunas. Beleid yang berlaku mulai 28 Maret 2026 itu bertujuan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak di bawah 16 tahun.

Anggota Komisi I DPR Okta Kumala Dewi menilai, sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sudah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi tersebut, seperti TikTok. Namun, masih ada platform lain seperti YouTube dan Roblox yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pemerintah.

Dia mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang aktif melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kepatuhan para PSE. Peran Pemerintah sangat penting untuk memastikan aturan tersebut benar-benar berjalan efektif dalam melindungi anak di ruang digital.

"Ini menunjukkan keseriusan negara dalam menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak," ujar Okta dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut tersisa dua platform digital yang belum mematuhi kebijakan pembatasan akses bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Yaitu Roblox dan YouTube.

"Kami sudah mendapat komitmen kepatuhan dari X, Bigo Live, seluruh grup Meta yaitu Instagram, Facebook, Threads, dan juga TikTok," ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Okta menegaskan, Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap platform digital yang tidak mematuhi aturan. Penegakan hukum yang konsisten

menjadi faktor kunci agar seluruh PSE memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan ruang digital yang aman. "Ini penting agar tidak ada kompromi dalam isu perlindungan anak di ruang digital," tegas politikus PAN ini.

Okta menyebut, PP Tunas sebagai langkah strategis dan progresif Pemerintah dalam menjawab tantangan perlindungan anak di era digital. Karena itu, seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung implementasi kebijakan tersebut. "Ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga seluruh ekosistem digital," katanya.

Okta mendorong keterlibatan orang tua dalam pengawasan aktivitas anak saat menggunakan internet. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan anak menggunakan teknologi secara aman dan bijak. "Pengawasan dan edukasi dari keluarga menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan dan perlingan anak di dunia digital," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menambahkan, penerapan PP Tunas menjadi langkah strategis di tengah tren global pembatasan akses medsos bagi anak. Seluruh dunia sedang bergerak ke arah yang sama. "Indonesia justru termasuk yang paling tegas dalam implementasinya," terangnya.

Nurul mengatakan, setidaknya ada 19 negara yang telah menerapkan, membahas, atau akan memberlakukan kebijakan serupa terkait pembatasan medsos bagi anak dan remaja. Pemerintah juga telah menegaskan tak ada kompromi kepatuhan platform digital terhadap aturan tersebut.

Untuk itu, Nurul memuji sejumlah platform seperti X dan Bigo Live yang mulai menyesuaikan kebijakan, termasuk menaikkan batas usia minimum pengguna dan memperkuat moderasi. ■ TIF